



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);

23. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35);
24. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 36);
25. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 38);
27. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);
28. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 40);
29. Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Kecamatan di Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 41);
30. Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II ...

BAB II
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 adalah pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 yang disertai dengan upaya untuk mencapai target kinerja pelayanan yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021, yaitu :
- a. Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - b. Rencana Kerja Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - c. Rencana Kerja Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - d. Rencana Kerja Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - e. Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - f. Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - g. Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - h. Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - i. Rencana Kerja Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - j. Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - k. Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - l. Rencana Kerja Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - m. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - n. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - o. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - p. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - q. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Kabanjahe Tahun 2021;
 - r. Rencana Kerja Akademi Kebidanan Kabanjahe Tahun 2021;
 - s. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - u. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - v. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - w. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - x. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - y. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - z. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karo Tahun 2021;
 - aa. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karo Tahun 2021;

aa. Rencana ...

- bb. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
- cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun 2021;
- dd. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2021;
- ee. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
- ff. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2021;
- gg. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo Tahun 2021;
- hh. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Karo Tahun 2021;
- ii. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo Tahun 2021;
- jj. Rencana Kerja Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2021;
- kk. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM Kabupaten Karo Tahun 2021;
- ll. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2021;
- mm. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2021;
- nn. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2021;
- oo. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Tahun 2021;
- pp. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2021;
- qq. Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
- rr. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;
- ss. Rencana Kerja Kecamatan Kabanjahe Tahun 2021;
- tt. Rencana Kerja Kecamatan Berastagi Tahun 2021;
- uu. Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2021;
- vv. Rencana Kerja Kecamatan Payung Tahun 2021;
- ww. Rencana Kerja Kecamatan Tiganderket Tahun 2021;
- xx. Rencana Kerja Kecamatan Munte Tahun 2021;
- yy. Rencana Kerja Kecamatan Tigabinanga Tahun 2021;
- zz. Rencana Kerja Kecamatan Juhar Tahun 2021;
- aaa. Rencana Kerja Kecamatan Lau Baleng Tahun 2021;
- bbb. Rencana Kerja Kecamatan Barus Jahe Tahun 2021;
- ccc. Rencana Kerja Kecamatan Tigapanah Tahun 2021;
- ddd. Rencana Kerja Kecamatan Kutabuluh Tahun 2021;
- eee. Rencana Kerja Kecamatan Merek Tahun 2021;
- fff. Rencana Kerja Kecamatan Mardingding Tahun 2021;
- ggg. Rencana Kerja Kecamatan Merdeka Tahun 2021;
- hhh. Rencana Kerja Kecamatan Naman Teran Tahun 2021; dan
- iii. Rencana Kerja Kecamatan Dolat Rayat Tahun 2021.

- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2020

BUPATI KARO,


TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 47